

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia. Namun pembangunan nasional belum tersebar secara merata hingga kepulauan-pulau terpencil di wilayah perbatasan. Pulau-pulau ini belum tersentuh oleh proses pembangunan, aksesibilitas keluar masih sangat sulit, dan bahkan beberapa diantaranya mulai mengadopsi budaya dari negara tetangga. Akibatnya tidak jarang masyarakat pulau-pulau kecil masih jauh tertinggal dari kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya dari daerah lain. (Kusumastanto, 2003). Wilayah gugusan pulau-pulau terpencil tersebut secara ekonomis mempunyai potensi yang sangat kaya akan lahan yang cukup luas, sumber laut, sumber daya tambang, dan pariwisata. Padahal, jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau terpencil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial.

Wilayah yang terdiri atas kepulauan memiliki dua potensi dasar yang berbeda karakteristiknya yaitu wilayah kepulauan dan lautan. Potensi kelautan yang sangat besar bukan hanya sebagai alternatif sumber daya ekonomi, namun dapat menjadi potensi utama yang tidak kalah dengan daratan. Tetapi selama masa pembangunan yang sudah berjalan beberapa dasa warsa di Indonesia belum secara optimal mengelola potensi tersebut. Sehingga hal tersebut perlu kebijakan

pengembangan khusus pengelolaan potensi kepulauan dan kelautan sebagai pusat perekonomian wilayah.

Menurut Budiharsono (2008) wilayah kepulauan dapat dikembangkan menjadi tempat pengelolaan sumberdaya lautan yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Secara umum dalam pengembangan potensi kelautan yang sangat besar memiliki banyak kendala, antara lain : (1) Pemerintah dan masyarakat masih terkonsentrasi pada eksplorasi daratan, (2) Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kepulauan khususnya tentang kelautan membutuhkan teknologi tinggi, (3) Kualitas sumberdaya manusia kepulauan relatif masih rendah, (4) Teknologi yang terkait dengan perikanan laut masih belum banyak terjangkau nelayan kelas bawah, serta, (4) Sistem kelembagaan pendukung pengembangan sektor kelautan belum tersedia dengan baik. Kendala-kendala tersebut diatas juga dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep dalam pengembangan wilayah kepulauan dan kelautan. Bukan hanya hal-hal tersebut saja yang menjadi permasalahan, namun wilayah kepulauan yang sangat panjang dan luas juga menjadi kendala tersendiri.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terdiri atas kepulauan, bahkan jumlah pulaunya terbanyak ke dua di Indonesia. Secara geografis wilayahnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah daratan (Pulau Madura) seluas 1.146,93 km² (54,79%) dan kepulauan seluas 946,53 Km² (45,21%). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Sumenep memiliki potensi pesisir dan kelautan yang cukup besar (RTRW Kabupaten Sumenep, 2010).

Wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep yang cukup luas dan panjang menjadi salah satu lokasi yang strategis untuk pengembangan ekonomi yang berbasis kelautan. Karakteristik penduduk menurut latar belakangnya cenderung berbeda antar wilayah kepulauan. Masyarakat Kecamatan Giligenting, Talango, Nonggunong, Gayam dan Raas adalah Suku Madura dan Bahasa Madura sebagai bahasa pengantar kehidupan masyarakatnya. Sedangkan masyarakat Kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken dan Masalembu berasal dari multi etnis, yaitu Suku Bajo, Mandar, Makassar dan Madura dengan berbagai keragaman sosial budayanya. Penduduk Suku Bajo, Mandar dan Makassar masih ada yang mempertahankan model rumah panggungnya sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun internasional untuk berkunjung dan juga banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Tabel 1.1: Luas wilayah dan jumlah pulau-pulau menurut administrasi wilayah Kabupaten Sumenep

N O	KECAMATA N	LUAS KM ²	P U L A U	
			BERPENGHUN I	TIDAK BERPENGHUN I
1.	Masalembu	40,851994	3	1
2.	Sapeken	201,88724 5	21	32
3.	Kangayan	204,76952 5	3	23
4.	Arjasa	241,89076 7	3	9

5.	Raas	38,903542	9	5
6.	Nonggunong	40,079960	2	0
7.	Gayam	88,398873	1	0
8.	Talango	50,267080	2	3
9.	Giligenting	30,318876	3	5
	J U M L A H		48	78

Sumber: Sumenep Dalam Angka, 2012.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* menuntut kesiapan aparat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi diharapkan mampu meningkatkan kinerja perekonomian daerah sehingga dampaknya akan memperluas lapangan kerja yang tersedia, meningkatkan pendapatan orang perorang, rumah tangga dan dunia usaha. Namun fakta menunjukkan sebaliknya justru pada tahun 2011 kinerja perekonomian mengalami penurunan atau pelambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2010 yang digambarkan

dengan semakin menurunnya pertumbuhan sektoral di sebagian besar sektor ekonomi.

Tabel 1.2: Pertumbuhan Sektoral PDRB Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Sumenep Tahun 2009-2011

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011
1. PERTANIAN	3,07	3,26	2,55
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6,36	6,72	5,44
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,37	2,89	4,53
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4,60	4,04	4,66
5. BANGUNAN	4,74	4,42	5,24
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	7,12	7,98	6,83
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,68	5,67	5,01
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	6,38	5,78	6,91
9. JASA-JASA	3,71	6,34	5,57
TOTAL	4,25	4,81	4,16

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumenep, 2012

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, mengalami kenaikan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,13 persen, namun sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar 1,05 persen, kemudian sektor lain yang mengalami pelambatan pertumbuhan di atas 1 persen, meliputi sektor pertambangan dan penggalian, sektor angkutan dan komunikasi.

Sektor lain seperti jasa-jasa, dan sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan di bawah 1 persen.

Menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2010 diketahui bahwa tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat wilayah kepulauan relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat wilayah daratan. Kecamatan Sapeken dan Gayam dapat dikecualikan dari Indeks Pembangunan Manusia yang rendah karena tingkat pendidikan dan daya beli masyarakatnya cukup tinggi. Sedangkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Kecamatan Arjasa, Kangayan, Talango, Masalembu dan Nonggunong memerlukan pelayanan dan perbaikan yang signifikan untuk pembentukan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Tabel 1.3: Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep dan Komponen-komponen Pembentuknya Tahun 2011

KECAMATAN	IP	IHH	IDB	IPM	RANKING
Sapeken	78,04	63,20	71,95	71,06	5
Gayam	77,16	64,05	71,07	70,76	6
Raas	77,88	63,10	65,92	68,97	14
Giligenting	75,22	63,28	66,23	68,24	19
Arjasa	68,84	64,46	71,01	68,11	20
Kangayan	66,85	63,07	70,16	66,69	21
Talango	69,39	64,39	64,93	66,24	22
Masalembu	57,00	63,32	69,75	63,36	26
Nonggunong	52,50	63,04	70,79	62,11	27
Kabupaten	72,67	65,08	68,94	68,90	-

Sumenep					
----------------	--	--	--	--	--

Sumber : Bappeda Kab. Sumenep, 2012

Dari uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya penelitian ini untuk dilanjutkan, dengan adanya bukti data serta realita yang ada di Kabupaten Sumenep terutama yang menjadi focus penelitian ini yaitu kecamatan kepulauan kabupaten sumenep

1.2. Rumusan Masalah

Dalam studi perencanaan ini ada beberapa permasalahan yang akan dianalisis dan dibahas terkait dengan Analisis pengembangan kawasan Ekonomi terpadu, yaitu :

- a. Bagaimana menetapkan pusat pertumbuhan wilayah kepulauan dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasinya?
- b. Bagaimana mengidentifikasi peta potensi ekonomi dan komoditi unggulan wilayah kepulauan serta pengelolaan komoditinya sejak tahap produksi sampai dengan pasca produksi?
- c. Bagaimana menentukan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan wilayah kepulauan dan aksesibilitas jaringannya dengan wilayah sekitarnya?

- d. Bagaimana menyediakan kerangka acuan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep sesuai potensi dan keunggulan wilayahnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Perencanaan Kawasan Ekonomi Terpadu Wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep adalah :

- a. Untuk menetapkan pusat pertumbuhan wilayah kepulauan dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasinya ;
- b. Untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi dan komoditi unggulan wilayah kepulauan serta pengelolaan komoditinya sejak tahap produksi sampai dengan pasca produksi ;
- c. Untuk menentukan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan wilayah kepulauan dan aksesibilitas jaringannya dengan wilayah sekitarnya ;
- d. Untuk menyediakan kerangka acuan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep sesuai potensi dan keunggulan wilayahnya ;

1.4 Manfaat penelitian

Banyak sekali manfaat yang mungkin dapat dirasakan dari penelitian ini, dan juga akan ada banyak pihak yang akan merasakan manfaat dari penelitian ini terutama bagi peneliti sendiri, dan tidak ketinggalan juga bagi pemerintah dan masyarakat sebagai actor pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

- **Manfaat bagi peneliti**

Penelitian ini merupakan sumber wawasan, pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti, sehingga dengan diteruskannya penelitian ini, peneliti akan lebih memahami banyak hal yang kaitannya juga dengan wawasan serta pengetahuan ekonomi pembangunan khususnya.

- **Manfaat bagi pemerintah**

Karna pemerintah merupakan bagian dari lembaga penguasa Negara atau suatu wilayah, dengan adanya penelitian ini akan memberikan kemudahan bagi lembaga pemerintah terutama lembaga pemerintah yang terkait dengan perencanaan pembangunan kawasan kepulauan yaitu sebagai bahan dasar untuk menentukan arah kebijakan, sehingga mempermudah pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat.

- **Manfaat bagi masyarakat**

Tidak ketinggalan pula penelitian ini juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat terutama yang berada di kawasan kepulauan karna selain mereka sebagai masyarakat kepulauan, mereka juga sebagai pengelola dan yang memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah kepulauan. Sehingga mereka perlu tau potensi

serta kekayaan alam yang ada di kawasan kepulauan serta harus bagaimana pengolahannya.

Dari beberapa manfaat tersebut seharusnya masih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian ini, pada dasarnya penelitian ini memberi kemudahan atau efisiensi bagi berbagai pihak dan juga menjadi pengetahuan secara umum